



Bursa Kerja On-line

Ledakan pencari kerja yang terjadi setiap tahun di hampir semua daerah di Jateng-DIY, membuat pemerintah melalui instansi terkait melakukan berbagai upaya membantu mereka. Bahkan Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta untuk memfasilitasi para pencari kerja, membuka bursa kerja online melalui www.infokerja.depnakertrans.go.id.

Melalui *web* ini para pencari kerja bisa langsung mendaftarkan diri ke beberapa perusahaan mitra Dinsosnakertrans yang membuka lowongan. "Pencari kerja bisa langsung berhubungan sendiri dengan perusahaan yang bersangkutan," terang Pengantar Kerja Madya Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Sri Hartati.

Selain itu, pihaknya juga memberikan pelayanan pencari kartu kuning melalui fasilitas *web* itu. Pencari kartu kuning tinggal mengisi formulir secara *online*. Selanjutnya membawa kartu identitas dan foto ke Dinsosnakertrans untuk diverifikasi dan dilegalisir petugas.

Meski kartu kuning *online* baru dibuka sejak pertengahan April 2011, namun hingga akhir Mei 2011 ini sudah ada 235 orang yang menggunakan fasilitas ini. "Ke depan fasilitas ini akan kita optimalkan sehingga pencari kerja bisa lebih berinteraksi dengan perusahaan yang membuka lowongan kerja," tambahnya.

Kata Sri Hartati, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta juga menjembatani para pencari kerja agar masuk ke lapangan kerja yang tersedia. Salah satunya menggandeng beberapa perusahaan baik lokal maupun nasional.

Setiap tahun kata dia, pihaknya melakukan seleksi penerimaan karyawan untuk 25 perusahaan mitra. Dari langkah itu sedikitnya 3.000 tenaga kerja bisa tersalur ke sejumlah perusahaan. Langkah lain adalah melakukan pelatihan dan pemberian peralatan bagi para pencari kerja yang dididik berwirausaha.

Sementara di Sleman, menurut Kabid Ketenagakerjaan di Disnakersostrans setempat, Sutiasih SP, sebenarnya setiap tahun Sleman bisa mendapatkan tawaran lowongan pekerja melalui program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sampai 3.000 lowongan. Umumnya, kata dia, tawaran itu datang dari Batam, Bintan, Kaltim, dan Jabodetabek. Hanya saja dari 3.000 itu biasanya Sleman hanya memenuhi sekitar 15 persennya saja.

Hal ini, katanya, karena kebanyakan pencari kerja, baik yang sudah berpengalaman, maupun pencari kerja baru, sangat selektif memilih pekerjaan di sektor formal seperti di Batam, Bintan, Jabodetabek — berkaitan dengan perusahaan dan jenis kerjanya. "Para pencari kerja baru daerah ini sebagian besar lulusan SMK," katanya.

Khusus di Sleman, kata dia, Disnakersostrans mempunyai mitra kerja bursa kerja khusus, dimana mitra kerja khusus ini diberi kewenangan untuk melakukan rekrutmen langsung ke SMK-SMK yang ada di Sleman sesuai kebutuhan mereka.

Investasi

Bagi Wakil Ketua Fraksi PKS di DPRD Sleman, Huda Tri Yudianta ST, tak ada cara lain untuk menciptakan lapangan kerja ada-

lah dengan mengundang sebanyak-banyak investor ke kabupaten ini. "Artinya, bagaimana menciptakan iklim investasi yang bisa membuat investor tertarik," tuturnya.

Sebenarnya tambah Huda, sudah ada Perda yang semangatnya adalah memberikan kemudahan investasi di Sleman. Namun ironisnya, dalam praktiknya tak semudah itu. "Masih saja banyak keluhan dari calon investor yang merasa dipersulit mengurus perizinan," kata dia.

Tidak saja kesulitan mendapatkan IPPT (izin perubahan penggunaan tanah), begitu juga di level pemerintah desa. Katanya, banyak di antara mereka yang menganggap para investor sebagai 'ATM' (anjungan tunai mandiri).

Menurut dia, penciptaan tenaga kerja di Sleman tak bisa berharap banyak pada APBD, yang per tahunnya hanya mencapai Rp 1,2 triliun. Sebab, dari jumlah itu hanya 30 persennya atau sekitar Rp 400 miliar yang kembali ke masyarakat melalui belanja langsung.

Apalagi, tuturnya, dari jumlah Rp 400 miliar itu hampir 80 persennya ternyata juga masih berupa belanja pegawai. Sehingga yang benar-benar terealisasi menjadi proyek langsung hanya 20 persen.

"Jadi tak ada cara lain, untuk menciptakan lapangan kerja hanya melalui menciptakan kebijakan-kebijakan pro investasi, diikuti dengan perbaikan perilaku aparat pelaksananya," kata Huda.

Mengutip rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman tahun 2012, Huda menjelaskan, pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja di Sleman sebesar 465.759 orang. Jumlah ini terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 422.490 dan penduduk yang tidak bekerja sebanyak 43.269 orang — jadi rasio penduduk bekerja pada tahun 2010 adalah 0,9. ■

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005